



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Ridho dan hidayah-Nya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA – PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena hal ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja pada tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Dana Indikatif berserta sumbernya serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan.

Semoga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur ini dapat mencerminkan kinerja kesinambungan Program & Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Larantuka, Juli 2022

Sekretaris DPRD,



D. YOHANIS KOPONG
PEMBAKTI MA MUDA IV/C
NIP. 19660226 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
.....	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	7
Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	16
Tabel II.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	19
Tabel III.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	32
Tabel IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
--	---



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44'21) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1812);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KRU
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Ttmur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impactj).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rancangan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES
TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan, *stakeholder* lain dan masyarakat. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra). Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu acuan dalam menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah.

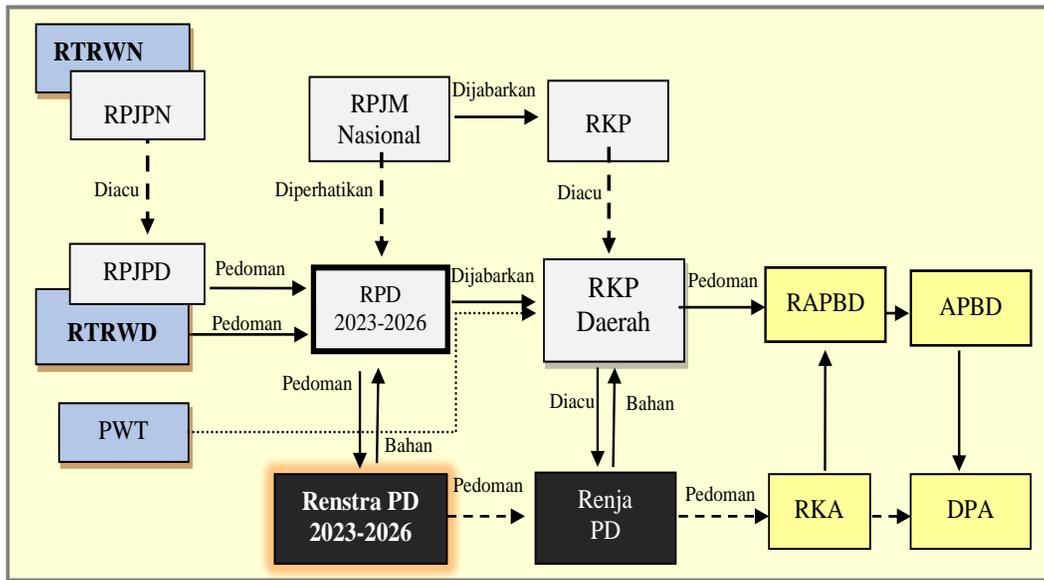
Rencana kerja tahunan organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam penyusunan Renja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja OPD berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA - Perangkat Daerah (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah) yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA- PD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah).

Keterkaitan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.1. berikut;

Gambar 1.1 Hubungan antara Renja PD Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No-);
- n. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Renja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2013;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- t. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 72);
- u. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
- v. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuannya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah :

- a. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
- b. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- c. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian serta evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pagu Indikatif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2021.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana digambarkan pada Tabel II.1. berikut:

						<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>								
x	xx	01				Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>								
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Penyediaan jasa surat menyurat (lembar)</i>	3275	614	700	623	89	250	1,487	45
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (rekening)</i>	9	27	8	9	112.5	8	9	100
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional (unit)</i>	19	12	12	12	100	5	12	63
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	<i>Jasa administrasi keuangan (Bulan)</i>	-	-	-	-	-	14	14	-
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jasa administrasi keuangan (orang)</i>	9	9	9	9	100	9	9	100

x	xx	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jasa kebersihan kantor (paket)</i>	104	60	20	20	100	20	100	96
x	xx	01	2.06	04		<i>Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Jenis)</i>	78	36	12	12	100	34	78	100
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	<i>Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)</i>	12	12	12	12	100	12	12	100
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (Komponen)</i>	12	12	12	12	100	12	12	100
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Jenis)</i>	3	3	3	3	100	3	3	100
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah penyediaan makanan & minum kantor dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD beserta staf Sekretariat DPRD (Dos)</i>	13,900	8,850	3,000	2,950	98	1,000	12,800	92
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi (Pjd)</i>	785	471	157	157	100	70	698	89

x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Terlaksananya penyediaan tenaga pendukung dan teknik perkantoran (Orang)</i>	30	30	34	30	88	30	30	100
x	xx	01				<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>								
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>								
						<i>Pembangunan Gedung DPR</i>								
						<i>pembangunan rumah jabatan dprd</i>								
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (Unit)</i>	0	0	12	0	0	2	2	-
						<i>Terlaksananya penga daan peralatan kantor (Unit)</i>	0	0	12	0	0	4	4	-
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah									
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Terlaksananya jasa pemeliharaan mobil Jabatan (Unit)</i>	9	3	3	3	100	3	9	100
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Terlaksananya jasa pemeliharaan Kendaraan Operasional (Unit)</i>	15	15	15	15	100	15	15	100

x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor(Paket)</i>	1	1	1	1	100	5	1	100
						<i>Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (Unit)</i>	35	35	35	35	100	5	35	100
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor (Paket)</i>	-	-	-	-	-	5	5	-
x	xx	01				<i>Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</i>								
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Peningkatan Disiplin Aparatur (%)</i>								
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Tersedianya sumber daya aparatur yang terampil dan profesional terhadap implementasi Peraturan Perundang-undangan (Kali)</i>	38	27	9	9	100	2	38	100
x	xx	01				<i>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)</i>							-	

x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)</i>							-	
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan (Dokumen)</i>	27	12	7	7	100	8	27	100
4	02	02					<i>Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)</i>							-	
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								-	
4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Perda	<i>Terlaksananya penyusunan dan pembahasan Ranperda (paket)</i>	1	1	1	1	100	1	1	100
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
4	02	02	2.05	02		Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi antara alat kelengkapan DPRD dengan pejabat PEMDA dan Tomas (paket)</i>	1	1	1	1	100	1	1	100

x	xx	01					<i>Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)</i>								
x	xx	02	2.16				Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)								
							<i>Terlaksananya rapat- rapat alat kelengkapan dewan (Paket)</i>	1	1	1	1	100	1	1	100
x	xx	02	2.16	03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD <i>Terlaksananya pembahasan dan penetapan keputusan / peraturan DPRD, Perda dan Kebijakan Politik DPRD (Paket)</i>	1	1	1	1	100	1	1	100
4	02	02					<i>Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)</i>								
4	02	02	1.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
4	02	02	1.05	03			Pelaksanaan Reses <i>Terlaksananya kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD ke 19 Kecamatan (Kali)</i>	3	3	3	3	100	3	3	100

4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	<i>Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke 19 kecamatan (Pjd Kunker)</i>	152	152	152	152	100	150	152	100
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Terlaksananya kegiatan kapasitas pelayanan terhadap kegiatan DPRD (Kali)</i>	3	3	3	3	100	3	3	100
4	02	02	1.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
x	xx	01				<i>Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)</i>								
x	xx	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)									
x	xx	02	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	<i>Terlaksananya Rapat Rapat Fraksi DPRD (Kali)</i>	60	60	60	60	100	40	60	100

2.2. Analisa Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat ditunjuk pada Tabel II.2.

Tabel II.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	□	✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintergrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan.		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran kedalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		✓	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka yang menjadi isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
3. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
4. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Minimnya SDM yang sesuai dengan bidang pendidikan (Hukum, Akuntansi, Komputer, Kearsipan dan lain-lain).
6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.
7. Sebagai organisasi yang memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menyadari bahwa tanggungjawab keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD merupakan implementasi dari harapan dan keinginan masyarakat luas serta bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk dapat melakukan fasilitasi terhadap DPRD tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan terdapat tantangan yang dihadapi oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD antara lain :
 - Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.
 - Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
 - Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
 - Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang

bersumber dari APBD. RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Perangkat Daerah telah terakomodir di dalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 2 (dua) program yaitu 1 program urusan dan 1 program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Fasilitasi Tugas DPRD

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka pada tahun 2023 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dimana didalamnya terdapat 2 (dua) program, 16 (enam belas) kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur

Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan				
URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023			URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023		
		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEKRETARIAT DPRD			22,331,278,024					24,065,382,475	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			16,590,082,024		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			18,350,113,325	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	16,590,082,024		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	18,350,113,325	
	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100				<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100		
	<i>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>	100				<i>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</i>	100		
	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100				<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</i>	100		
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)</i>	9	42,750,000		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya dokumen perencana, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)</i>	9	42,750,000	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	4,250,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	4,250,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	5	31,000,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	5	31,000,000	Larantuka (OPD)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	2	5,000,000	Larantuka (OPD)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	2	5,000,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>	13	2,032,000,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>	13	2,032,000,000	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)</i>	30/14	1,952,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Vv	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)</i>	30/14	1,952,000,000	Larantuka (OPD)
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	9	60,000,000	Larantuka (OPD)	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	9	60,000,000	Larantuka (OPD)
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)</i>	1	3,500,000	Larantuka (OPD)	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)</i>	1	3,500,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	15,000,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	15,000,000	Larantuka (OPD)
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	4	5,500,000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	4	5,500,000	
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	2	53,750,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	2	3,750,000	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	1,250,000	Larantuka (OPD)	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	1,250,000	Larantuka (OPD)
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	<i>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>	50	585,100,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>	50	580,600,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)</i>	1	170,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)</i>	1	170,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>	1	80,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>	1	80,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)</i>	32,5	65,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)</i>	2	88,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan (paket)</i>	2	45,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan (paket)</i>	2	45,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)</i>	3	25,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)</i>	3	25,000,000	Larantuka (OPD)

Fasilitasi kunjungan tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	1	60,100,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi kunjungan tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	1	60,100,000	Larantuka (OPD)
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	20	120,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	20	90,000,000	Larantuka (OPD)
					Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100	300,000,000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100	2,300,000,000	
				Larantuka	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>	1	2,000,000,000	Larantuka
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	1	300,000,000	Larantuka (OPD)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	1	300,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	46	464,000,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	46	464,000,000	
Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)</i>	4	3,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)</i>	4	3,000,000	Larantuka (OPD)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	65,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	65,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)</i>	30	396,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)</i>	30	396,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</i>	45	312,982,024		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</i>	45	289,982,024	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	3	105,482,024	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	3	78,482,024	Larantuka (OPD)
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	17	91,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	17	95,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	30	7,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	30	7,500,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	2	65,000,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	2	65,000,000	Larantuka (OPD)

Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	12	15,000,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	12	15,000,000	Larantuka (OPD)
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	10	26,500,000	Larantuka (OPD)	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	10	26,500,000	Larantuka (OPD)
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11,710,000,000		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11,710,000,000	
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)</i>	360	11,500,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)</i>	360	11,500,000,000	Larantuka (OPD)
Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)</i>	3	165,000,000	Larantuka (OPD)	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)</i>	3	165,000,000	Larantuka (OPD)
Pelaksanaan medical check up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)</i>	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah	Pelaksanaan medical check up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)</i>	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah
Layanan Administrasi DPRD		36	1,084,000,000		Layanan Administrasi DPRD		36	921,531,301	
Fasilitasi fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)</i>	6	54,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)</i>	6	54,000,000	Larantuka (OPD)
Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)</i>	30	1,030,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)</i>	30	867,531,301	Larantuka (OPD)
Sekretariat DPRD			5,741,196,000		Sekretariat DPRD			5,715,269,150	

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,741,196,000		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,715,269,150	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,946,000		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,019,150	
Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	79,946,000	Larantuka (OPD)	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	79,019,150	Larantuka (OPD)
Pembahasan rancangan perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	560,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan rancangan perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	560,000,000	Larantuka (OPD)
Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)</i>	3	59,000,000	Larantuka (OPD)	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)</i>	3	59,000,000	Larantuka (OPD)
Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000	
Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)</i>	1	35,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)</i>	1	35,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)

Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)
Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	100,000,000		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75,000,000	
Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)
Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	75,000,000	Larantuka	Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka
Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000	
Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah	Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah
Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah	Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah
Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah	Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000	
Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah	Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah
Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka
Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah	Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah
Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000	
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah
Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah
Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur sebagai fasilitator berbagai kegiatan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang memfasilitasi aktivitas dewan baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD. Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD direncanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 16 Kegiatan. Dengan demikian Tahun 2023 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggungjawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Mekanisme check and balance dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai cerminan representatif lembaga perwakilan rakyat.

DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat.

Atas dasar hal itu guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam menjalankan check and balance terhadap kebijakan pemerintah daerah, Sekretariat DPRD merupakan fasilitator dalam upaya menunjang tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai kinerja yang maksimal sebagai pengemban amanah rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pelayanan Sekretariat DPRD yang bersinergi dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (T-1) dan sasaran ke-1, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S-1) adalah melalui Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode Tahun 2023 – 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : *“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada DPRD ”*

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh

karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2. Mendorong perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2023 untuk pelaksanaan dukungan pelayanan kepada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja yaitu dengan melaksanakan 2 Program, 16 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Fasilitasi Tugas DPRD

TABEL III.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBE R DANA	P N	P D	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,715,269,150				PP	114	4,641,196,000
4	02	02	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,019,150				KP	15	752,000,000
4	02	02	2:01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)	3	59,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	60,000,000
4	02	02	2:01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	51,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000				KP	8	756,896,000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)	1	35,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	79,946,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	560,000,000

4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	66,950,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	50,000,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	45,000,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75,000,000				KP	3	100,000,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	25,000,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	75,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000				KP	7	407,300,000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah	APBD II (DAU)			5	400,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,800,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,500,000

4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000				KP	65	2,535,000,000
4	02	02	2.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	280,000,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	55,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	2,200,000,000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000				KP	16	90,000,000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			10	50,000,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			5	15,000,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	25,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dan dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 termuat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4-2	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DPRD		24,065,382,475							21,927,778,024
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		18,350,113,325							17,286,582,024
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	18,350,113,325					100	17,286,582,024
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100						100	
x	xx	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	9	42,750,000			KP	9	45,500,000	

x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	2	4,250,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	4,500,000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	3,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)</i>	5	31,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	32,500,000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja perangkat Daerah (Laporan)</i>	2	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	5,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</i>	13	2,032,000,000				KP	13	2,077,000,000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Vv	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)</i>	30/14	1,952,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			30/14	1,922,000,000

x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	9	60,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			9	65,000,000
x	xx	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (dokumen)</i>	1	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	65,000,000
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (laporan)</i>	2	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	20,000,000
x	xx	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (dokumen)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	5,000,000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	4	5,500,000				KP	4	20,500,000
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	16,500,000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	2	2,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	1,500,000

x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	1	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	2,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</i>	2	3,750,000			KP	2	12,500,000
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	7,500,000
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (dokumen)</i>	1	1,250,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	5,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</i>	50	580,600,000			KP	60	656,817,976
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	20	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		30	30,000,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan (paket)</i>	1	170,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	34,317,976
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)</i>	1	80,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	170,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)</i>	2	88,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		2	80,000,000

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2023

x	xx	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan (paket)</i>	2	45,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	180,000,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)</i>	3	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	50,000,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)</i>	1	60,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	35,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)</i>	20	90,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			20	75,000,000
x	xx	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	2,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</i>	100	2,300,000,000				KP	100	1,500,000
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)</i>	1	2,000,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	2,020,000,000

x	xx	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	1	300,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	600,000,000	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</i>	46	464,000,000				KP	46	469,000,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)</i>	4	3,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		4	3,000,000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	12	65,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		12	70,000,000	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)</i>	30	396,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		30	396,000,000	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</i>	45	289,982,024				KP	45	333,482,024
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	3	78,482,024	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		3	105,482,024	

x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	17	95,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		17	91,000,000
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)</i>	30	7,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		30	10,000,000
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)</i>	1	2,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		1	15,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	2	65,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		2	65,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi(unit)</i>	12	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		12	20,500,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(unit)</i>	10	26,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		10	26,500,000
x	xx	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		393	11,710,000,000			KP	393	12,370,282,024
x	xx	01	2.15	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)</i>	360	11,500,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		360	12,075,000,024
x	xx	01	2.15	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (paket)</i>	3	165,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)		3	250,282,000

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2023

x	xx	01	2.15	03	Pelaksanaan medical check up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)</i>	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah	APBD II (DAU)			30	45,000,000
x	xx	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		36	921,531,301				KP	36	1,300,000,000
x	xx	01	2:16	02	Fasilitasi fraksi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (laporan)</i>	6	54,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	1,000,000,000
x	xx	01	2:16	03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (laporan)</i>	30	867,531,301	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			30	300,000,000
4	02				Sekretariat DPRD			5,715,269,150						4,641,196,000
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		114	5,715,269,150				PP	114	4,641,196,000
4	02	02	02.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		15	748,019,150				KP	15	752,000,000
4	02	02	2:01	01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	79,019,150	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	80,000,000
4	02	02	2:01	02	Pembahasan rancangan perda	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)</i>	5	560,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	561,000,000
4	02	02	2:01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (dokumen)</i>	3	59,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	60,000,000

4	02	02	2:01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (dokumen)</i>	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	51,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		8	265,000,000				KP	8	756,896,000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)</i>	1	35,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	79,946,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	560,000,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)</i>	2	75,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	66,950,000
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)</i>	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	50,000,000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	45,000,000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		3	75,000,000				KP	3	100,000,000

4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (dokumen)</i>	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	25,000,000
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (dokumen)</i>	1	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	75,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		7	607,250,000				KP	7	407,300,000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)</i>	5	600,000,000	Luar daerah	APBD II (DAU)			5	400,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)</i>	1	3,750,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,800,000
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (dokumen)</i>	1	3,500,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	3,500,000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		65	3,930,000,000				KP	65	2,535,000,000
4	02	02	2.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)</i>	30	280,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	280,000,000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)</i>	5	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	55,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)</i>	30	3,600,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			30	2,200,000,000

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

TAHUN 2023

4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		16	90,000,000				KP	16	90,000,000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (dokumen)</i>	10	50,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			10	50,000,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)</i>	5	15,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			5	15,000,000
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (dokumen)</i>	1	25,000,000	dalam daerah	APBD II (DAU)			1	25,000,000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Rencana 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJP Provinsi, RKPD Provinsi, RPJMPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten Flores Timur, Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 memperhatikan Kaidah – Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun lalu
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
4. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam membangun daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 memuat arah kebijakan Pembangunan dan berisikan Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan kaidah kaidah perencanaan, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah , masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk itu, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Kesehatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2023 untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Rencana kerja tahun 2023 ini dijadikan sebagai dasar bagi perangkat daerah

dalam penyusunan RKA Tahun 2023 menuju ke APBD untuk pelaksanaan Renja. Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur ini disusun sesuai ketentuan berdasarkan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022

Sekretaris DPRD,



YOHANIS KOPONG
PEMBESARAN MUDA IV/C
NIP. 19660226 199403 1 003